

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DALAM  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BINTAN**

SKRIPSI

NAMA : YUNI DANIAN TI  
NIM : 13622043

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ( STIE )  
PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG  
2020**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DALAM  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BINTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

**NAMA : YUNI DANIANTI**

**NIM : 13622043**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ( STIE )  
PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG**

**2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DALAM  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : YUNI DANIANI  
NIM : 13622043

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing kedua,

**Bambang Sambodo, SE, M.Ak**  
NIDK. 8833900016/ Asisten Ahli

**Marina Lidya, S.Pd, M.Pd**  
NIDN. 1024037602/ Asisten Ahli

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Hendy Satria, SE, M.Ak**  
NIDN. 1015069101/ Lektor

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DALAM  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BINTAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
NAMA : YUNI DANIANI  
NIM : 13622043

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh  
Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Sepuluh (Tanggal saat ujian) Dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

**Bambang Sambodo, SE, M.Ak**  
NIDK. 8833900016 / Asisten Ahli

**Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA**  
NIDN. 1020037101/Lektor  
Anggota,

**Meidi Yanto, S.E, M. Ak**  
NIDK.8804900016/ Asisten Ahli

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,

**Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA.**  
NIDN. 1029127801/Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Yuni Danianti  
NIM : 13622043  
Tahun Angkatan : 2013  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,44  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Sistem Informasi  
Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Penyejian  
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, April 2020  
Penyusun,

Materai

Yuni Danianti  
NIM: 13622043

## HALAMAN PERSEMBAHAN



“Dengan rasa syukur saya persembahkan karya sederhana ini kepada bapak dan ibu tercinta Jumianto, SE dan Jati Suprati yang telah banyak mendoakan saya tanpa henti. Terimakasih atas kasih sayangnya, pengorbanannya, nasehatnya, semangatnya, serta apa saja yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Mohon maaf karena tidak bisa membahagiakan bapak dan ibu dengan cara lulus tepat waktu:’)”

“Tak lupa juga saya persembahkan karya sederhana ini untuk suami Abdul Rahman Nurman, Anak saya Adeeva Salsabila dan Adik Sigit Danianto yang menjadi penyemangat dan acuan saya menyelesaikan karya sederhana ini”

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atau segala Rahmat dan KarunaiNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Skripsi ini berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan ”. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E, M.Ak., Ak.CA selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.,Ak selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.CA Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Imran Ilyas, MM selaku Penasehat Akademik saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, SE, M.Ak selaku pembimbing I saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Marina Lidya, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing II saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak/Ibu dosen beserta staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)

Pembangunan Tanjungpinang.

9. Kedua orang tua Bapak Jumianto, SE dan Ibu Jati Suprati serta Adik Sigit Danianto yang telah memberi dukungan untuk saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Suamiku Abdul Rahman dan Anakku Adeeva Salsabila yang menjadi penyemangat untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Untuk rekan-rekan Bapelitbang Bintang Subbag Keuangan dan BKAD Bintang Subbid Akuntansi informasi dan Pelaporan Kegiatan yang sedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses pembuatan skripsi.
12. Teman-teman seperjuanganku dikampus yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini Nurliya Syafitri, Risnawati, Retno Wulandari, Endang Triwinarsih, Yosihara.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kearah penyempurnaan dalam skripsi ini. Penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan kita dan senantiasa terus membimbing kita menuju Hidayah-Nya.

Tanjungpinang, 13 April 2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1Kegunaan Ilmiah .....	6
1.4.2Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Sistem Informasi Manajemen.....	8
2.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .....	9
2.2.1Program Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7.0.6.....	11
2.2.2Program Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.69 dan Versi 2.0.69 .....	12
2.2.3Program Aplikasi Komputer SIMDA Gaji.....	13
2.2.4Program Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan Versi 1.2.0.9 .....	14
2.2.5Keunggulan Dan Manfaat Penggunaan Simda.....	15
2.2.6Operator SIMDA (KOMPETENSI SDM) .....	18
2.3 Laporan Keuangan .....	19

2.3.1Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
2.3.2Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah .....	21
2.3.3Periode Pelaporan.....	24
2.4 Penyajian Laporan Keuangan.....	25
2.5 Kerangka Pemikiran .....	27
2.6 Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2. Jenis Data .....	33
3.2.1 Data primer.....	33
3.2.2.Data sekunder .....	34
3.3 Tehnik Pengumpulan Data .....	34
3.3.1Wawancara .....	34
3.3.2Observasi .....	34
3.3.3Studi Pustaka .....	34
3.4 Tehnik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	36
4.1.1Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Bintan .....	36
4.1.2 Impelementasi SIMDA di Pemerintah Kabupaten Bintan .....	48
4.1.3..Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 .....	73
4.2 Pembahasan .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Nama-nama OPD Kabupaten Bintang tahun 2018 .....	46
TABEL 4.2 Laporan Perubahan Ekuitas OPD dan PPKD.....	53
TABEL 4.3 Laporan Realisasi Anggaran OPD dan PPKD .....	54
TABEL 4.4 Laporan Operasioanl OPD dan PPKD .....	55
TABEL 4.5 Neraca OPD dan PPKD .....	58
TABEL 4.6 Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bintang .....	61
TABEL 4.7 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bintang .....	63
TABEL 4.8 Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang.....	64
TABEL 4.9 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintang .....	67
TABEL 4.10 Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bintang .....	70
TABEL 4.11 Neraca Pemerintah Kabupaten Bintang .....	71
TABEL 4.12 Analisis Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintang.....	78

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Pemikiran .....	27
GAMBAR 4.1 Alur Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Lembar Wawancara

LAMPIRAN II Hasil *Scan* Plagiat

LAMPIRAN III *Curriculum Vitae*

**ABSTRAK****Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)  
dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Bintang****Yuni Danianti. 13622043. S1 Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Pembangunan Tanjungpinang. [Yunidanianti19@gmail.com](mailto:Yunidanianti19@gmail.com)**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten bintang dengan menggunakan sistem informasi manajemen daerah (simda) dan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten bintang dengan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.*

*Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.*

*Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengoperasian aplikasi SIMDA, OPD hanya diberi akses pengguna dan belum diberi akses penuh dalam pengoperasian aplikasi SIMDA. Apabila ada Jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian, OPD-OPD harus menunggu data yang akan dibagikan oleh PPKD setelah PPKD selesai membuat Jurnal koreksi dan Penyesuaian LKPD. Ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 64 Tahun 2013 yang mengharuskan melakukan konsolidasi Laporan keuangan OPD dan PPKD untuk membuat LKPD*

*Komponen-Komponan Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sisa Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan) yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sudah sesuai dengan elemen laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Padapemerintah Daerah.*

**Kata Kunci : SIMDA Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, Akuntansi**

**Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, SE, M.Ak**

**Dosen Pembimbing 2 : Marina Lidya, S.Pd, M.Pd**

**ABSTRACT**

***Analysis of the Implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) in the Presentation of Government Financial Statements Bintan Regency***

**Yuni Danianti. 13622043. S1 Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Yunidanianti19@gmail.com**

*This study aims to determine the presentation of bintan district government financial reports using the regional management information system (simda) and to determine the presentation of bintan district government financial reports based on the Republic of Indonesia domestic ministerial regulation number 64 of 2013 concerning the application of accrual-based government accounting standards to the government area.*

*This research is a descriptive qualitative research. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used in this research is descriptive analysis.*

*The results of this study are in the operation of the SIMDA application, OPD is only given user access and has not been given full access in the operation of the SIMDA application. If there is a Correction Journal and adjusting journal, the Regional Representative Offices must wait for the data to be shared by the PPKD after the PPKD has finished making the Correction and Adjustment Journal of the LKPD. This is not in accordance with Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia 64 of 2013 which requires the consolidation of OPD and PPKD financial statements to make LKPD*

*Components-Component Financial Statements (Balance Sheet, Budget Realization Reports, Operational Reports, Equity Change Reports, Statements of Remaining Budget Balance, Cash Flow Statements, and Notes to Financial Statements) produced by the Regional Management Information System (SIMDA) of Finance are in accordance with the elements financial statements regulated in Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 64 of 2013 concerning the Application of Accrual Based Government Accounting Standards to Regional Governments.*

*Keywords: SIMDA Finance, Presentation of Financial Statements, Accounting*

*Adviser 1 : Bambang Sambodo, SE, M.Ak*

*Adviser 2 : Marina Lidya, S.Pd, M.Pd*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era reformasi ini, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia semakin meningkat. Pemerintahan yang bersih atau tata kelola yang baik dapat dilihat dengan tiga pilar utama yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Saat ini teknologi informasi semakin menunjukkan perannya dalam organisasi/ instansi. Hal ini ditandai dengan mudahnya akses informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Pengoperasian teknologi informasi ini tidak terlepas dari fungsi komputer, manajemen dan teknologi komunikasi. ketiga fungsi perangkat ini dapat dikatakan sebagai jantung teknologi informasi. Di bidang akuntansi, sistem informasi akuntansi berbasis komputer banyak disajikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji.

Sistem informasi meliputi sejumlah komponen ( manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja,) ada sesuatu yang di proses ( data menjadi informasi ) dan dimaksud untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Kadir, 2014). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik seperti komputer, maka tingkat efisiensi pekerjaan semakin meningkat. Sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian

diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki tugas menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan organisasi pendorong serta fasilitator dalam hal keberhasilan pembangunan disuatu daerah (Handyaningrat, 2010).

Kewajiban penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang bertujuan mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik di tingkat pelaporan ataupun di tingkat akuntansi. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. ([www.BPKP.go.id](http://www.BPKP.go.id)).

SIMDA adalah program aplikasi komputer yang terintegrasi sehingga dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan ([Www.bpkp.go.id](http://Www.bpkp.go.id), 2008). Penggunaan SIMDA oleh pemerintah daerah merupakan kebijakan yang harus dijalankan. Implementasi SIMDA akan memberikan dampak yang positif

pada Pemerintahan Daerah, karena aplikasi SIMDA Keuangan ini akan membuat Pemerintah Daerah lebih mudah dalam penyajian laporan keuangan daerah. Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi SIMDA menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (Budiman, Fuad, 2013). Kemudahan yang didapat dari aplikasi SIMDA ini disesuaikan dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang ketepatan waktu penyajian laporan realisasi semester dan laporan keuangan pemerintah daerah tahunan mulai dari PPK OPD menyampaikan ke kepala OPD selaku Pengguna Anggaran. Kepala OPD Menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD untuk dilakukan konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pertanggung jawaban kepala daerah selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten yang telah menerapkan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Kabupaten Bintan menerapkan aplikasi sistem informasi manajemen yang lebih luas dari berbagai subsistem yang ada dalam SIMDA tersebut. Salah satu aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh Kabupaten Bintan adalah SIMDA Keuangan, yang membantu mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan tersebut ke instansi di atasnya. Kabupaten Bintan telah menerapkan aplikasi SIMDA ini sejak tahun 2014, penerapan tersebut masih menemui beberapa kendala teknis yang terkait dengan proses penyajian pelaporan keuangan, tetapi output yang dihasilkan

oleh sistem ini lebih terstruktur dari penyusunan yang dibuat oleh sistem manual. Dalam proses penyajian laporan keuangan daerah Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai entitas akuntansi.

Perbedaan latar belakang pendidikan operator SIMDA dan PPK setiap OPD serta letak geografis pemerintah kabupaten bintang menjadi keterbatasan tersendiri dalam penyajian laporan keuangan. Penulis yang merupakan operator simda di salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Bintang sering mempunyai kendala seperti belum bisa memperbaiki sendiri apabila terjadi kesalahan saat memasukkan data transaksi dan posting jurnal ke aplikasi SIMDA, sehingga harus pergi ke level administrator yang ada di PPKD.

Berdasarkan latar belakang di atas, dirasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat mempermudah tugas pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu,; **“Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)?
2. Bagaimana penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bintan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Ilmiah**

Kegunaan Ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan mengenai Analisis Implementasi Sistem Informasi Manjaemen Daerah (SIMDA) dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi penulis penelitian ini bukan hanya sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, tetapi juga sebagai sarana mengimplementasi teori-teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi untuk penelitian berikutnya yang membahas masalah yang sama.
2. Bagi Instansi Pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mendukung Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bintan guna mewujudkan good government.
3. Bagi pihak lain hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan penulisan menyeluruh dan agar mudah dipahami, disusun suatu sistematika penulisan yang terbagi atas 5 (lima) bab:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini menjelaskan tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan di lakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang Jenis Penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan serta saran-saran penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sistem Informasi Manajemen**

Menurut (Yakub, 2012), mengemukakan sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. sistem informasi adalah gabungan dari orang-orang, perangkat lunak (hardware), software, dan sumber daya data yang dapat mengumpulkan, mengolah, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Sistem informasi manajemen ini memiliki banyak manfaat untuk pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Adapun manfaat Sistem Informasi Manajemen seperti:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan realtime
2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis.
4. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi

## 2.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan (Www.bpkp.go.id, 2008). SIMDA merupakan aplikasi keluaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2003, Deputi Pengawasan pada Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mendirikan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan tugas:

1. Mengembangkan dan melakukan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berhubungan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke *grand design* dari *Database Management System (DBMS)*.
2. Memberikan pembimbingan pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang ditugaskan dalam asistensi/penerapan Program Aplikasi Komputer SIMDA.
3. Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi penerapan Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah. Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah:
  - a. Menyediakan Database yang terkait kebutuhan di daerah baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah dan pelayanan publik yang digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.

- b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Untuk perencanaan dan pelaporan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang relevan, akurat, dan tepat BPKP mengembangkan program aplikasi berbasis dekstop dan web-based sebagai aplikasi keuangan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada pemerintah daerah. Aplikasi SIMDA digunakan pada organisasi pemerintah daerah secara terintegrasi satu dengan yang lain.

Aplikasi SIMDA digunakan sebagai pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Output aplikasi ini antara lain:

1. Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Jabaran APBD, APBD dan Jabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## 2. Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

## 3. Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Hasil pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3. Program Aplikasi SIMDA Gaji
4. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan
5. Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6. Sub Aplikasi Gabungan per Provinsi
7. Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

### **2.2.1 Program Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7.0.6**

Program aplikasi ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Output aplikasi ini antara lain:

1. Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Jabaran APBD, APBD dan Jabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Suar Pertanggung Jawaban ( SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

### **2.2.2 Program Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.69 dan Versi 2.0.69**

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan terkait barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

Output aplikasi ini antara lain :

1. Perencanaan yaitu Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2. Pengadaan yaitu Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
3. Penatausahaan yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4. Penghapusan yaitu SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan
5. Akuntansi yaitu Daftar Barang yang termasuk dalam Daftar Barang , neraca, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per OPD.

### **2.2.3 Program Aplikasi Komputer SIMDA Gaji**

Aplikasi Komputer SIMDA Gaji dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penggajian pegawainya. Aplikasi ini akan membantu pemda untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan.

Ouput dari aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Daftar Gaji, Rapel, Gaji Terusan, Perhitungan Pajak.
2. Daftar Pegawai.
3. Register- register.

#### **2.2.4 Program Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan Versi 1.2.0.9**

Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah serta agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan.

Output dari aplikasi antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan

Formulir Pendaftaran, Tanda Terima Pendaftaran, Kartu NPWP/RD, Daftar Wajib Pajak/Retribusi, Daftar SPTP/RD, dan Kartu Data.

2. Penetapan

Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah, SKP/RD (Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah), Daftar SPKP/RD, SKP/RD Tambahan, OPD/R Kurang Bayar, SKP/RD Nihil, Daftar Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah dan Daftar Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah

3. Penatausahaan

Laporan Penerimaan Harian, Laporan Realisasi Penerimaan, Kartu Piutang, Buku Pembantu Rincian Penerimaan per Obyek, STS (Surat Tanda Setoran) dan Buku Kas Umum.

Seluruh program aplikasi SIMDA didukung dengan :

- Buku Manual Sistem dan Prosedur sesuai dengan jenis aplikasi
- Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi
- Panduan-panduan Pembantu lainnya, misalnya Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan, Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah, Modul

Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah, Panduan Administrator, Modul Pelatihan, dan lain-lain.

### **2.2.5 Keunggulan dan Manfaat Penggunaan Simda**

#### 1. Sesuai peraturan perundang-undangan

Aplikasi SIMDA Keuangan di disain berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,
- UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tetang Rencana Kerja Pemerintah
- PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 8 tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 32 Tahun 2011

## 2. Terintegrasi

Aplikasi SIMDA dapat dimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di OPD, sehingga mempunyai keuntungan :

- a. Pengendalian transaksi terjamin
- b. Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- c. Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.

### 3. *Transfer of Knowledge*

Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal:

- a. Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit,
- b. Penguasaan business process pengelolaan keuangan daerah, dan
- c. Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah,

Serta didukung dengan kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses transfer of knowledge dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah .

### 4. Kestinambungan Pemeliharaan

Dengan komitmen dan dukungan dari pimpinan dan eksistensi BPKP maka pengembangan dan perbaikan Aplikasi SIMDA masih terus dilakukan meliputi :

- a. Penyempurnaan dan Perbaikan Aplikasi SIMDA mengikuti praktik pengelolaan keuangan terbaik
- b. Penyesuaian dengan peraturan yang terbit kemudian
- c. Memeliharaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang menimplementasikan

### 5. Mudah Digunakan

Fitur-fitur sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi ini

(output dokumen transaksi seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D), secara otomatis catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan (output catatan akuntansi seperti buku jurnal, buku besar, dan laporan

### **2.2.6 Operator Simda (Kompetensi SDM)**

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Menurut (Amran, 2009) menyatakan sebagai berikut: “Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan.” Kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikirdan bertindak sesuai dengan profesinya.

Operator merupakan seseorang yang memiliki tugas dalam mengurus segala urusan mulai dari pengaktifan sampai perbaikan suatu peralatan. Operator menjadi profesi yang penting dalam suatu perindustrian atau perusahaan. Operator adalah orang yang akan menjalankan dan mengurus segala keperluan dalam melakukan operasi system.

Operator SIMDA adalah pegawai pelaksana yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entry dan pengolahan data atau tugas lain.

### 2.3 Laporan Keuangan

Menurut (Munawir, 2010) mengatakan bahwa Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasilhasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Pengertian Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 1 2015 adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Pengertian Laporan Keuangan Menurut (Fahmi, 2011) Definisi laporan keuangan menurut Irham Fahmi yang mana dijelaskan bahwa arti laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan mengenai kinerja suatu perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 2012 laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi ara penggunanya.

Menurut (Sutrisno, 2012) Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi Dua laporan utama yakni neraca dan juga laporan laba-rugi. Adapun laporan keuangan ini disusun dengan maksud guna menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang

berkepentingan untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan.

### **2.3.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dimulai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut (MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 2013) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2010). Setiap entitas organisasi pemerintahan wajib untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara/ daerah selama satu periode (PP No. 8 tahun 2006) sebagai syarat pendukung akuntabilitas atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

### **2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Tujuan umum dari laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode

### 2.3.3 Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlahjumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyajian laporan selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## 2.4 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut (Hehanussa, 2015) penyajian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset,liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

Menurut (Aisyah, Ramadhani Nurul, 2014) yang dikutip dalam Governmental accounting Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah

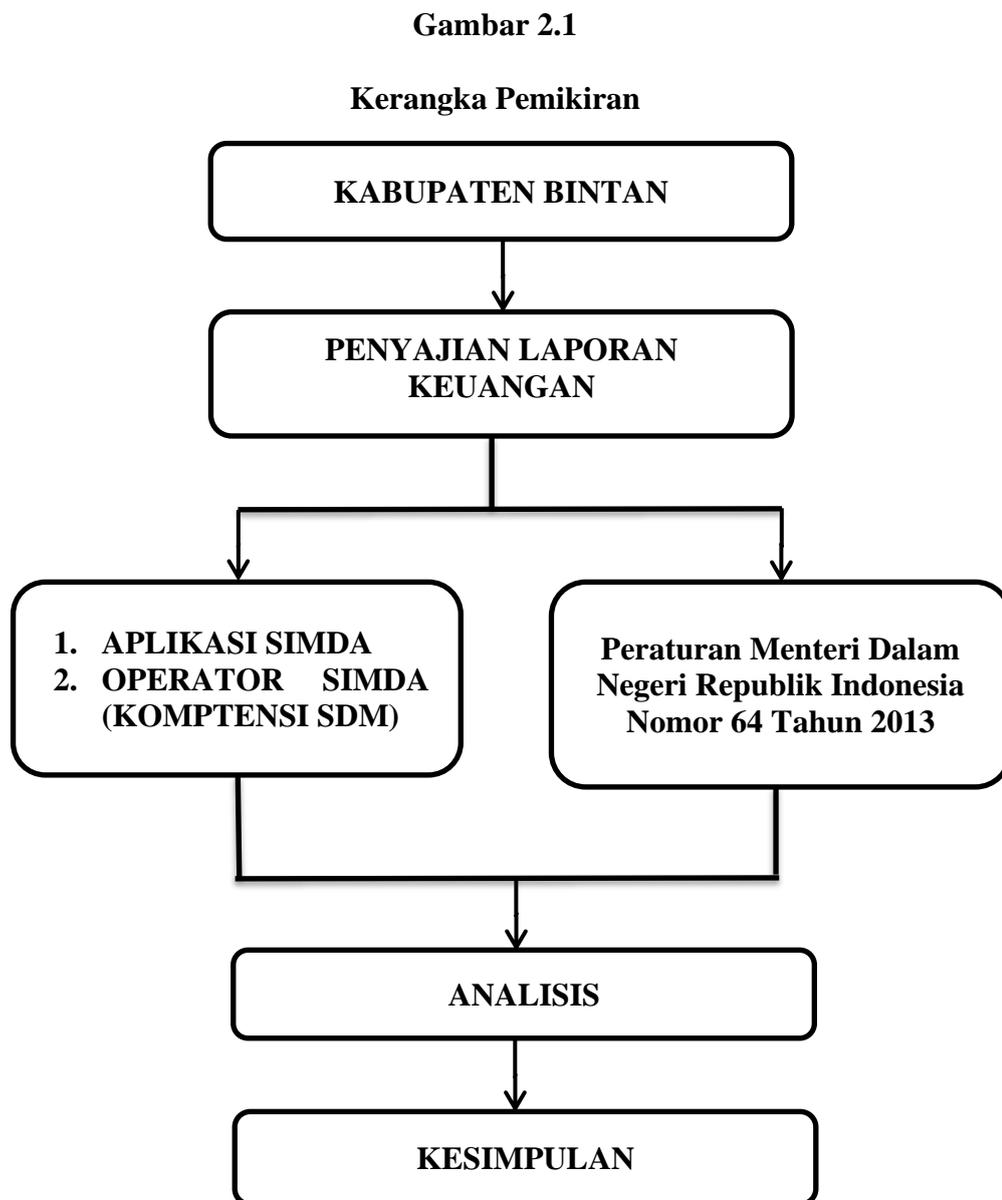
untuk menjadi akuntabel secara publik dan untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, Laporan keuangan Pemda ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD.

Pada saat akan disusun laporan keuangan pemda maka laporan keuangan OPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang jelas dan sistematis untuk memecahkan masalah. Berikut jika kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sekema dapat diamati sebagai berikut



*Sumber : Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian 2019.*

## 2.6 Penelitian Terdahulu

1. (Nugraha, Harmadhani Adi dan Astuti, 2013)

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasimanajemen Keuangan Daerah(Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)”. Pesatnya perkembangan teknologi adalah salah satu faktor utama yang dikembangkan sistem informasi berbasis komputer. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan dalam organisasi pemerintah daerah, maka dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan atau SIMDA. SIMDA telah diterapkan oleh Departemen Kesehatan Nganjuk sejak 2007 sebagai sistem informasi Manajemen keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Pada 2011 Departemen Kesehatan Nganjuk didefinisikan sebagai prioritas kedua dalam penganggaran Pemerintah Daerah Nganjuk, jadi SIMDA Kesehatan Departemen akan dibantu dalam mengelola dan mengelola data keuangan dengan jumlah yang cukup besar. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan aplikasi dan pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan data keuangan melalui SIMDA, dan untuk menganalisis kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan menggunakan variabel yang

relevan, akurat dan abadi untuk menganalisis kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA.

2. (Halens Ryanlie Ole, 2014)

Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan cara pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tentang kualitas keuangan pelaporan di Badan Pendapatan, Keuangan dan Manajemen Aset (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen dilakukan dengan pendekatan cross-sectional. Wawancara dilakukan untuk Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara tentang implementasi SIMDA dan survei penyusunan laporan keuangan di DPPKAD kepada lima responden dan di OPD ke 30 bendahara. Hasil mengungkapkan bahwa penggunaan proses SIMDA sesuai dengan mandat Peraturan Menteri No. 13 tahun 2006 tentang Keuangan Daerah Pedoman Manajemen. Tingkat partisipasi OPD masih rendah, tetapi partisipasi menurut jenis pengguna sudah cukup bagus. Data menunjukkan bahwa pendapat BPK berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan SIMDA di masing-masing OPD. Faktor yang ditemukan mempengaruhi selain SIMDA terhadap kualitas keuangan pernyataan adalah faktor manusia, inspektorat, kepala kepemimpinan Daerah, umpan balik tentang rekomendasi BPK, dan konsistensi dalam

penerapan SIMDA. Evaluasi pada faktor manusia menyimpulkan bahwa tingkat sumber daya manusia adalah diklasifikasikan berdasarkan aspek latar belakang pendidikan SIMDA dan jumlah Bimtek. Sumber daya manusia inspektorat sangat baik dalam kualitas tetapi jumlahnya kurang dalam melayani di OPD. Pemimpin lokal dianggap cukup baik, umpan balik dari Rekomendasi BPK cukup baik, dan konsistensi dalam penerapan SIMDA juga bagus.

3. (Darea1 & Elim, 2015)

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Dppka Kabupaten Kepulauan Sangihe”. SIMDA Keuangan merupakan suatu Sistem Informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SIMDA keuangan di DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini akan mengukur sejauh mana keberhasilan dari penerapan SIMDA. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya SIMDA Keuangan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Proses penyajian dan penerapannya sudah terorganisir dengan

baik. Pimpinan DPPKA sebaiknya melakukan penambahan fungsi Administrator mengingat jumlah OPD yang cukup banyak, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada bendahara setiap OPD yang belum mengetahui cara penggunaan SIMDA agar meningkatkan akurasi dalam penyusunan APBD berbasis kinerja.

4. (Christoffel J. Hendriks, 2013)

Penelitian ini Berjudul "*Integrated Financial Management Information Systems : Guidelines For Effective Implementation By The Public Sector of South Africa*". Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (IFMIS) dapat meningkatkan manajemen sektor publik dengan memberikan informasi keuangan real-time kepada para manajer untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan mereka. Layanan Publik Afrika Selatan saat ini sibuk dengan implementasi IFMIS. Namun, implementasi dari proyek semacam itu telah terbukti menjadi tugas yang sangat menuntut dan belum pernah berhasil. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan risiko yang terlibat dalam implementasi IFMIS di Afrika Selatan. Setelah mengidentifikasi tantangan dan risiko, solusi atau pedoman dikembangkan yang dapat membuat implementasi lebih sukses. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur di mana teori dieksplorasi dan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan penelitian teoritis, solusi dan pedoman dikembangkan untuk mengatasi tantangan dan risiko yang dialami. Hasil menunjukkan bahwa ada sejumlah tantangan yang terlibat dengan implementasi IFMIS.

Seperangkat pedoman praktik terbaik dikembangkan yang dapat membuat implementasi lebih sukses. Kesimpulan: Ukuran dan kompleksitas semata-mata dari IFMIS menimbulkan tantangan signifikan dan sejumlah risiko pada proses implementasi. Namun, ada faktor keberhasilan kritis atau praktik terbaik yang dapat digunakan agar proyek berhasil. Disarankan bahwa praktik terbaik ini digunakan oleh Layanan Publik Afrika Selatan.

5. (Kahari, 2017)

Penelitian ini berjudul *“Assessment Of Factors Affecting The Implementation of Integrated Financial Management Information System In The County Governments: A Case Of Nyandarua County, Kenya”*.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei deskriptif terhadap sampel 70 karyawan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat, negatif dan signifikan secara statistik antara resistensi staf dan implementasi IFMIS; dan bahwa ada hubungan yang kuat, positif dan signifikan secara statistik antara kapasitas dan keterampilan pengguna IFMIS dan pelaksanaannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menguraikan aspek-aspek fenomena atau objek yang diteliti. Menurut (Djama'an Satori 2011) mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian bermaksud mengungkapkan fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

#### **3.2. Jenis Data**

##### **3.2.1 Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui wawancara langsung antara penulis dengan pihak yang bersangkutan.

### **3.2.2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai informasi tertulis mengenai situasi dan kondisi pihak yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3.3 Tehnik Pengumpulan Data**

### **3.3.1 Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap Kasubbid dan pelaksana sub bidang akuntansi informasi dan pelaporan Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bintan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan Sistem Informasi Manjaemen Daerah (SIMDA) dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

### **3.3.2 Observasi**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

### **3.3.3 Studi Pustaka**

Mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dan literature yang berhubungan dengan Implementasi Sistem Informasi Manjaemen Daerah (SIMDA) dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Menurut Supranto (2018) Untuk menentukan metode analisa data tergantung pada seberapa besar data yang diterima. Jika hasil observasi yang dikumpulkan jumlahnya sedikit maka dapat dilakukan pengolahan secara manual. Akan tetapi, jika jumlah observasi besar maka pengolahan data secara elektronik merupakan cara yang efektif.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang ditemukan oleh Miles & Huberman. Menurut buku yang ditulis oleh Imam Gunawan yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu (1) reduksi data; (2) paparan data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian yang mengevaluasi Implementasi Sistem Informasi Manjaemen Daeragh (SIMDA) dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian Laporan Keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan membandingkan antara Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Ramadhani Nurul, dkk. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Disfungsional Audit. *Accounting Analysis Journal*.
- Budiman, Fuad, and F. I. A. (2013). "Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah."
- Darea1, D. W., & Elim, I. (2015). EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA DPPKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174, Vol.3 No.2*.
- Djama'an Satori, A. K. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dwi Dayanti Oktavia, Erwin Saraswati, Z. B. (2016). Kesuksesan Implementasi SIMDA untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 2, No.*
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA.
- Halens Ryanlie Ole. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal 2014*.
- Handayaniingrat. (2010). *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon.
- Kadir, 2014. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kahari, K. dan W. (2017). assessment of factors affecting the implementation of integrated financial management information system in the county

governments: a case of Nyandarua County, Kenya. *Public and Municipal Finance, Volume 6*.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. (2013). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013.

Munawir, S. (2010). *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat. Cetakan Kelima Belas*. Yogyakarta: Liberty.

Nugraha, Harmadhani Adi dan Astuti, Y. W. (2013). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, No. 1: 25-33*.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2010). STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010.

Supranto, J. (2018). *Analisis Multivariat: Arti dan interpretasi*. Jakarta.: PT. Rineka Cipta.

Sutrisno. (2012). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (8thed.)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Www.bpkp.go.id. (2008). KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-11/K/IP/2008.

Yakub. (2012). *Pengantar Sistem informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## *CURICULUM VITAE*



Nama : Yuni Danianti  
Tempat / Tanggal Lahir : Kijang, 19 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Nomor HP : 0823 8648 7664  
Email : Yunidanianti19@gmail.com  
Alamat : Kp. Kolam Renang Kijang

### Nama Orang Tua

a. Ayah : Jumianto, SE  
b. Ibu : Jati Suprati

### Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 027 BINTAN  
b. SMP : SMPN 1 BINTAN  
c. SMA : SMAN 1 BINTAN  
d. S1 : STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG